



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

UPAYA Mendukung ASA SWASEMBADA PANGAN

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Rizki Mona Syawlia
Analisis Legislatif Ahli Pertama
rizki.syawlia@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Swasembada pangan di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah, dengan harapan agar negara mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tanpa ketergantungan pada impor. Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menuangkan komitmennya dalam Astacita yang salah satunya adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Swasembada pangan kembali menjadi salah satu program yang dikedepankan pada pemerintahan baru ini. Presiden dan para menteri optimis bahwa swasembada pangan dapat tercapai dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun ke depan, meskipun terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi.

Saat ini, Indonesia masih bergantung pada rantai pasokan global. Sepanjang Januari—Juni 2024, Indonesia mengimpor 3,05 juta ton beras, 8,44 juta ton gandum, 509,09 ribu ton jagung, dan 1,67 juta ton kedelai. Berbagai tantangan juga masih dihadapi pemerintah, seperti alih fungsi lahan dan perubahan iklim yang menyebabkan penurunan produksi pangan. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan yang matang dan sinergi antarkementerian serta lembaga terkait sangat diperlukan untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah telah merencanakan berbagai program kebijakan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, di antaranya dengan melanjutkan program *food estate* di Papua dan penambahan lahan panen di luar Pulau Jawa. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi komoditas strategis seperti padi, jagung, dan singkong. Program *food estate* ini merupakan kelanjutan dari upaya pemerintahan sebelumnya, tetapi masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Kebijakan *food estate* dihadapkan pada tantangan aspek lingkungan. Komoditas yang ditanam di lahan-lahan *food estate* umumnya adalah yang merupakan sumber bahan pangan pokok seperti padi, cabai, singkong, jagung, kacang tanah, hingga kentang. Meskipun beberapa daerah menunjukkan hasil yang baik, banyak juga yang justru gagal dan berdampak pada kerusakan ekologi. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, di antaranya ketidaksesuaian antara jenis lahan dengan varietas yang ditanam, belum meratanya ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia yang mengelola lahan, serta adanya kekhawatiran bahwa lahan yang digunakan merupakan kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan konservasi. Selain itu, kebijakan *food estate* juga menghadapi tantangan dari aspek sosial-ekonomi di kawasan tujuan dan lahan baru di luar Pulau Jawa. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan, terutama masyarakat adat di wilayah tersebut. Tantangan lainnya adalah perubahan iklim dan cuaca ekstrem, seperti fenomena El Nino, yang juga berdampak negatif pada produksi pangan di Indonesia. Data terbaru menunjukkan penurunan signifikan dalam produksi beras pada tahun 2024 akibat kekeringan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem sehingga mengancam kecukupan cadangan beras pemerintah.

Melihat berbagai tantangan yang ada, Indonesia masih harus melakukan banyak hal guna mencapai cita-cita swasembada pangan. Langkah *pertama* adalah mengedepankan kebijakan intensifikasi lahan melalui penyediaan varietas benih yang lebih baik, lebih tahan terhadap kondisi ekstrem, tahan hama, dan mampu menghasilkan panen lebih banyak. Selain itu, pemerintah juga perlu terus memastikan ketersediaan pupuk dan sistem irigasi yang memadai. Melalui upaya intensifikasi lahan, pemerintah diharapkan mampu menggenjot produktivitas lahan dan meningkatkan kesejahteraan petani. *Kedua*, perlu adanya perencanaan dan pengkajian yang matang atas kebijakan *food estate* agar meminimalkan kegagalan dan kerusakan lingkungan. Pemerintah juga perlu memastikan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lahan *food estate*, termasuk masyarakat adat. Program ini juga perlu memerhatikan keutuhan kawasan konservasi agar tidak mengancam keberlangsungan lingkungan hidup. *Ketiga*, mendorong diversifikasi pangan mengingat Indonesia kaya akan keragaman sumber daya pangan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu. *Keempat*, meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketersediaan pangan serta mendorong regenerasi. Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan pemberdayaan petani, asuransi petani, dan peningkatan kapasitas petani, baik secara individu maupun kelembagaan. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mendukung regenerasi petani.

Atensi DPR

Cita-cita mencapai swasembada pangan bukanlah perkara mudah untuk dicapai, terlebih dalam kurun waktu yang cukup singkat. DPR RI melalui Komisi IV dalam melaksanakan fungsi pengawasannya perlu melakukan beberapa hal. *Pertama*, mendorong pemerintah untuk mengedepankan konsistensi kebijakan, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan yang sebelumnya sehingga kebijakan pangan dapat berkesinambungan dan tidak mengulangi kegagalan atas kebijakan terdahulu. *Kedua*, memastikan mitra kerja terkait melakukan sinergi dan kerja sama dalam menjalankan berbagai program kebijakan yang dicanangkan. Asa swasembada pangan merupakan kebijakan multisektoral dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perencanaan kebijakan juga harus melibatkan masyarakat, khususnya petani. Melalui sinergi tersebut pemerintah diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak bertentangan, terutama kaitannya dengan aspek sosial dan ekologis. Melalui pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI perlu memastikan bahwa semua mitra kerja terkait memiliki kecukupan anggaran untuk melaksanakan berbagai program kerja yang mendorong pencapaian swasembada pangan.

Sumber

bisnis.com, 21 Oktober 2024;
cnnindonesia.com, 23 Oktober 2024;
indonesia.go.id, 24 Oktober 2024;
Kompas, 23 Oktober 2024;

kompaspedia.kompas.id, 22 Februari 2024;
korantempo.co, 23 Oktober 2024;
liputan6.com, 25 Oktober 2024;
Republika, 25 Oktober 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febyrka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

©PusakaBK2024